



Tinjauan Literatur Mengenai Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Penerimaan Negara dan Stabilitas Ekonomi di Indonesia

Muhamad Sahdian^{1*}, Erni Kristina Zai², Kristina Wolu Hudo³

¹⁻³Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: mhmdsyahdian@gmail.com

Abstract. Value Added Tax (VAT) is one of the main sources of government revenue and plays an important role in financing national development and maintaining fiscal stability. In recent years, the Indonesian government has adjusted VAT rates as an effort to increase state revenue and strengthen fiscal capacity. However, this policy has also generated various economic impacts, particularly on inflation, purchasing power, and household consumption. This study aims to analyze the contribution of VAT to state revenue and its impact on economic stability in Indonesia. The research employs a literature review approach using qualitative methods. Data were collected from scientific journals, books, government reports, and other relevant publications related to the research topic. The findings indicate that VAT contributes significantly to state revenue due to its broad and relatively stable tax base. On the other hand, higher VAT rates may increase the prices of goods and services, leading to inflationary pressures and reducing consumers' purchasing power, especially among middle- and lower-income groups. The decline in purchasing power may also affect household consumption, which is one of the key drivers of economic growth. Nevertheless, VAT remains an effective fiscal instrument for increasing government revenue when accompanied by policies that protect public welfare. The study implies that policymakers should balance the objective of increasing state revenue with the need to maintain economic stability, ensuring that tax policies remain effective, sustainable, and beneficial for society.

Keywords: Economic Stability; Household Consumption; Inflation and Purchasing Power; State Revenue; Value Added Tax (VAT).

Abstrak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan menjaga stabilitas fiskal. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melakukan penyesuaian tarif PPN sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat kapasitas fiskal. Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan berbagai dampak terhadap perekonomian, terutama terkait inflasi, daya beli, dan tingkat konsumsi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi PPN terhadap penerimaan negara serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan publikasi lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa PPN memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara karena memiliki basis pemajakan yang luas dan relatif stabil. Di sisi lain, kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa yang dapat mendorong inflasi serta menurunkan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan menengah ke bawah. Penurunan daya beli tersebut juga dapat memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat yang merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, kebijakan PPN tetap menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam meningkatkan pendapatan negara apabila diimbangi dengan kebijakan yang mampu menjaga kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah perlu menyeimbangkan tujuan peningkatan penerimaan negara dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi agar kebijakan perpajakan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Daya Beli Inflasi; Pajak Pertambahan Nilai; Penerimaan Negara; Stabilitas Ekonomi.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program kesejahteraan masyarakat. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan perpajakan menjadi komponen terbesar, sehingga keberadaannya sangat penting untuk menjaga stabilitas

ekonomi negara. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa.

Menurut Sari et al., (2025) PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa, dimana beban pajaknya ditanggung oleh konsumen akhir. Hal ini membuat PPN memiliki potensi penerimaan yang cukup besar dan relatif stabil karena berkaitan langsung dengan aktivitas konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan PPN sebagai salah satu instrumen utama dalam meningkatkan penerimaan negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif PPN, yaitu dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 dan kemudian meningkat menjadi 12% pada tahun 2025. Menurut Sari et al., (2025) Penerapan tarif 12% tersebut tidak diberlakukan secara menyeluruh, melainkan difokuskan pada barang dan jasa tertentu seperti barang mewah guna menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyeimbangkan antara peningkatan penerimaan negara dan perlindungan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, kenaikan tarif PPN tetap memiliki dampak terhadap perekonomian, terutama dalam hal harga barang dan jasa. Menurut Fadhillah dkk. (2025) kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan peningkatan harga yang kemudian mendorong terjadinya inflasi. Kenaikan harga tersebut tentu akan berdampak pada daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan pokok. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan PPN memiliki konsekuensi langsung terhadap stabilitas ekonomi.

Selain berdampak pada daya beli, kenaikan harga akibat PPN juga memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga penurunannya dapat berdampak pada perlambatan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat menurunkan konsumsi masyarakat, terutama pada kelompok menengah ke bawah akibat meningkatnya harga barang dan jasa (Alfitriyeni & Wulandari, 2025). Dengan demikian, kebijakan PPN tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, kenaikan tarif PPN juga memberikan dampak terhadap pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Armono dkk. (2025) kenaikan PPN berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa sehingga dapat menurunkan daya beli masyarakat dan berpengaruh terhadap penjualan pelaku usaha. Selain itu, kebijakan ini juga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan apabila tidak diimbangi dengan

sistem yang transparan dan kebijakan yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa dampak PPN tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga oleh pelaku usaha.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, sebagian besar masih membahas dampak PPN secara terpisah, seperti terhadap inflasi, daya beli, atau penerimaan negara saja. Padahal, dalam praktiknya, aspek-aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*), yaitu masih terbatasnya penelitian yang membahas secara menyeluruh mengenai kontribusi PPN terhadap penerimaan negara sekaligus dampaknya terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai peran PPN dalam perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan negara serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi, khususnya terkait inflasi dan daya beli masyarakat. Dengan menggunakan metode tinjauan literatur, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perpajakan yang lebih seimbang.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Menurut Sari dkk. (2025) PPN adalah pajak yang dibebankan kepada konsumen akhir, namun dalam pelaksanaannya dipungut dan disetorkan oleh pelaku usaha. PPN dikenakan pada setiap tahapan produksi dan distribusi, tetapi memiliki sifat non-kumulatif karena adanya mekanisme kredit pajak.

PPN memiliki peran penting dalam sistem perpajakan karena sifatnya yang luas dan relatif stabil. Hal ini disebabkan karena PPN berkaitan langsung dengan aktivitas konsumsi masyarakat yang cenderung terus berlangsung. Oleh karena itu, PPN sering dijadikan sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara. Selain itu, sistem pemungutan PPN di Indonesia menggunakan self-assessment system, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (Alfitriyeni & Wulandari, 2025).

Penerimaan Negara

Penerimaan negara merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak menjadi komponen terbesar dalam penerimaan negara, sehingga optimalisasi penerimaan pajak menjadi hal yang sangat penting.

Dalam hal ini, PPN memiliki kontribusi yang signifikan karena cakupan objek pajaknya yang luas.

Daya Beli dan Konsumsi

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan harga. Menurut Fadhilah dkk. (2025) kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa, sehingga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli ini akan berdampak pada berkurangnya tingkat konsumsi, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi merupakan kondisi di mana perekonomian suatu negara berada dalam keadaan yang relatif stabil, ditandai dengan inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang positif, dan daya beli masyarakat yang terjaga. Kebijakan fiskal, termasuk kebijakan perpajakan, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Kenaikan tarif PPN dapat memengaruhi stabilitas ekonomi melalui perubahan harga barang dan jasa. Menurut Fadhilah et al., (2025) kenaikan PPN memiliki pengaruh terhadap inflasi yang pada akhirnya berdampak pada daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan PPN perlu dirancang secara hati-hati agar tidak mengganggu keseimbangan ekonomi.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji dampak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari berbagai sudut pandang. Penelitian yang dilakukan oleh Alfitriyeni & Wulandari (2025) menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara, namun juga berdampak pada penurunan konsumsi masyarakat, terutama pada kelompok berpenghasilan menengah ke bawah.

Selanjutnya, penelitian oleh Armono et al., (2025) menemukan bahwa kenaikan tarif PPN berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan pelaku usaha, khususnya UMKM. Selain itu, Fadhilah dkk. (2025) menyatakan bahwa kenaikan PPN memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan inflasi melalui kenaikan harga barang dan jasa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa PPN memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara, namun juga memiliki dampak terhadap stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk memahami hubungan antara kontribusi PPN terhadap penerimaan negara dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tinjauan literatur (*literature review*) yang bertujuan untuk menganalisis kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan negara serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi terkait perpajakan dan kondisi ekonomi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas. Instrumen dalam penelitian ini berupa dokumen dan literatur yang dipilih berdasarkan kesesuaian topik, tahun publikasi, serta kredibilitas sumber. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan informasi, membandingkan temuan antar penelitian, serta menarik kesimpulan berdasarkan pola yang muncul. Model penelitian yang digunakan bersifat konseptual, yaitu menggambarkan hubungan antara PPN sebagai variabel independen dengan penerimaan negara dan stabilitas ekonomi sebagai variabel dependen, di mana stabilitas ekonomi dijelaskan melalui indikator seperti inflasi, daya beli, dan tingkat konsumsi masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran PPN dalam perekonomian tanpa menggunakan pengujian statistik secara langsung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, serta artikel yang relevan dengan topik Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerimaan negara, dan stabilitas ekonomi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyeleksi literatur yang terbit dalam beberapa tahun terakhir agar informasi yang digunakan tetap relevan dengan kondisi terkini. Selain itu, sumber yang dipilih juga mempertimbangkan kredibilitas penulis dan kesesuaian dengan topik penelitian.

Rentang Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu tahun 2022 sampai dengan 2025, yaitu periode setelah adanya kebijakan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% dan kemudian 12%. Lokasi penelitian tidak bersifat fisik karena penelitian ini berbasis studi literatur, namun fokus kajian berada pada kondisi perekonomian di Indonesia.

Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil kajian dari beberapa penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa PPN memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara. Kenaikan tarif PPN terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat kondisi fiskal pemerintah (Alfitriyeni & Wulandari, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa PPN menjadi salah satu sumber pendapatan yang stabil karena berkaitan langsung dengan aktivitas konsumsi masyarakat.

Namun di sisi lain, kenaikan tarif PPN juga berdampak terhadap kondisi ekonomi, khususnya pada harga barang dan jasa. Peningkatan tarif PPN cenderung menyebabkan kenaikan harga yang kemudian memicu inflasi (Fadhilah dkk., 2025). Dampak ini secara tidak langsung memengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Untuk memperjelas hubungan tersebut, berikut disajikan ringkasan hasil analisis dalam bentuk tabel:

Table 1. Dampak Kenaikan PPN terhadap Perekonomian.

Aspek	Dampak Positif	Dampak Negatif
Penerimaan negara	Meningkatkan pendapatan negara	-
Harga barang dan jasa	-	Cenderung meningkat
Daya beli masyarakat	-	Menurun, terutama kelompok menengah kebawah
Konsumsi masyarakat	-	Berpotensi menurun
Stabilitas ekonomi	Memperkuat fiskal pemerintah	Berisiko menekan pertumbuhan ekonomi

Sumber: Diolah oleh penulis (2025).

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN memiliki dua sisi, yaitu memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan aktivitas ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPN memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara. Hal ini sejalan dengan teori penerimaan negara yang menyatakan bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah. PPN yang berbasis konsumsi menjadikannya relatif stabil dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap APBN.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa yang memicu inflasi. Kondisi ini sesuai dengan teori daya beli yang menyatakan bahwa kenaikan harga akan menurunkan kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa. Dampak tersebut juga berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat yang merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Alfitriyeni & Wulandari (2025) yang menyatakan bahwa kenaikan PPN meningkatkan penerimaan negara

tetapi menurunkan konsumsi masyarakat. Selain itu, hasil ini juga mendukung penelitian Armono et al.,

(2025) yang menyatakan bahwa kenaikan PPN berpengaruh terhadap daya beli dan aktivitas ekonomi pelaku usaha.

Dari hasil tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan PPN memiliki hubungan yang cukup kompleks dengan stabilitas ekonomi. Di satu sisi, PPN membantu meningkatkan penerimaan negara, tetapi di sisi lain juga berpotensi menekan daya beli dan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang agar tujuan peningkatan penerimaan negara tidak mengganggu kondisi ekonomi masyarakat.

Implikasi Penelitian, secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa PPN memiliki peran ganda, yaitu sebagai sumber penerimaan negara sekaligus faktor yang memengaruhi stabilitas ekonomi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan, khususnya dalam menentukan tarif PPN agar tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara dan berperan penting dalam memperkuat kondisi fiskal pemerintah. Kenaikan tarif PPN terbukti mampu meningkatkan pendapatan negara, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak terhadap stabilitas ekonomi, terutama melalui kenaikan harga barang dan jasa yang dapat memicu inflasi. Dampak tersebut berpengaruh pada penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat, khususnya pada kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Dengan demikian, PPN memiliki peran yang cukup kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga memengaruhi kondisi ekonomi secara luas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan PPN yang lebih seimbang antara upaya peningkatan penerimaan negara dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan kebijakan yang lebih selektif, seperti pemberian pengecualian atau insentif pada kebutuhan pokok dan kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi dan transparansi dalam sistem perpajakan agar dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji topik ini dengan metode yang lebih mendalam, misalnya menggunakan data empiris atau pendekatan kuantitatif, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Alfitriyeni, I. F., & Wulandari, E. V. R. (2025). Peran PPN dan PPnBM terhadap penerimaan negara dan stabilitas ekonomi nasional. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 67–71. <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i4.664>
- Armono, D., Wicaksono, N. I., Setiana, A. N., & Nurhayanto. (2025). Evaluasi kebijakan kenaikan PPN: Pengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (studi literatur). *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 22(1), 721–724.
- Fadhilah, N., Rahmawati, D., & Putri, A. (2025). Pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap inflasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 15–25.
- Sari, M., & Maryani, T. (2025). Analisis peran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan negara di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 6(1), 45–53.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN 2025: Informasi dan kinerja anggaran negara*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Indikator ekonomi Indonesia 2025*. BPS. <https://www.bps.go.id>
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan perekonomian Indonesia 2024*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id>
- Ananda, R., & Pratama, I. (2024). Dampak kebijakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap daya beli masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 88–97.
- Budiman, T., & Lestari, S. (2024). Analisis pengaruh perubahan tarif PPN terhadap konsumsi rumah tangga. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 10(1), 33–42.
- Cahyono, D., & Utami, N. (2023). Peran pajak konsumsi dalam meningkatkan penerimaan negara. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 7(3), 120–129.
- Dewi, A. P., & Santoso, B. (2024). Inflasi dan kebijakan pajak tidak langsung di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Makro*, 6(2), 55–64. <https://doi.org/10.57235/jahe.v2i2.7209>
- Fajar, M., & Handayani, R. (2025). Evaluasi dampak kenaikan PPN terhadap sektor perdagangan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 11(1), 14–23. <https://doi.org/10.54196/jami.v2i1.188>
- Gunawan, R., & Siregar, H. (2023). Pajak konsumsi dan stabilitas fiskal di negara berkembang. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 5(2), 101–110.
- Hidayat, T., & Nuraini, L. (2024). Pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Nasional*, 8(1), 70–79.
- Iskandar, Y., & Pratiwi, D. (2025). Analisis kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap inflasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 90–99.
- Kurniawan, A., & Saputra, E. (2024). Efektivitas PPN sebagai sumber penerimaan negara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 40–48.
- Lestari, W., & Rahman, F. (2023). Pajak konsumsi dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 6(3), 115–124.
- Mahendra, D., & Putri, S. (2024). Dampak perubahan tarif pajak terhadap inflasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 10(2), 58–67.

- Nugroho, B., & Wijaya, A. (2025). Analisis kontribusi PPN terhadap APBN Indonesia. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Negara*, 8(1), 25–34.
- Purnama, R., & Sari, D. (2023). Pajak tidak langsung dan pengaruhnya terhadap konsumsi masyarakat. *Jurnal Ekonomi Makro Indonesia*, 7(2), 80–89.
- Rahayu, M., & Setiawan, F. (2024). Kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi makro di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 11(1), 60–69.
- Wibowo, H., & Prasetyo, Y. (2025). Dampak PPN terhadap inflasi dan kesejahteraan rumah tangga. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 10–19.